

**PERAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA
(PBHI) WILAYAH SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI SUTRA SANTI

NIM: 10300113150

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Sutra Santi
Nim : 10300113150
Tempat/Tgl. Lahir : Papanjaya, 28 Juli 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Pondok Ilham, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa
Judul : Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
Wilayah Sulawesi Selatan dan Melindungi Hak Konstitusional
Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 26 Juli 2017

Penyusun,



Sri Sutra Santi

NIM. 10300113150

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam”, yang disusun oleh Sri Sutra Santi, NIM: 10300113150, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M, bertepatan dengan 8 Dzulqa’dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 6 Agustus 2017

14 Dzulqa’dah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)
Munaqasah I	: Dr. Fadli A. Natsir, M. H	(.....)
Munaqasah II	: Abd. Rahman Kanang, M. Pd, Ph. D	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Thahir Maloko, M. H. I	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, M. H. I	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Peran Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan Dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahatan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Syamsuddin dan Ibu Rosmini yang telah memberikan dukungan dan do'a serta kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta keluarga besarku yang ada di Kajang Kabupaten Bulukumba yang selalu memberikan dukungan yang terbaik. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Nila Satrawati, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan Ibu Dr. Kurniati, M.Hi selaku Sekretaris Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan.
5. Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi dan Ibu Dr. Kurniati, M.Hi, selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. Fadli A. Natsif, M.H selaku penguji I dan Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D selaku penguji II yang telah siap memberikan nasehat, saran dan perbaikan dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk

melakukan penelitian. Dan semua pengacara PBHI wilayah Sul Sel yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

8. Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Sahabat saya Sunarti Jaya Arista, Mirnawati, Nurfatimah, Hardiyanti, dan Selfiani, S. Pd yang selalu ada buat saya mulai dari SMA hingga saat ini dan telah memberikan saya support dan motivasi yang luar biasa. Teman-teman SD dan SMP saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih banyak.
10. Sahabat saya Hasmira, Intan Syamsuddin, Fira Yuniar, Sartika BT. Gia, Nur Aulia Rahma, Nur Samsi Idris, M. Wawan Dermawan, Muhammad Munir Majid, yang selama 4 Tahun terakhir ini di kampus tercinta berbagi suka duka hingga berjuang menyelesaikan tugas akhir bersama-sama. Fighting and Succes buat kita semua. Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga Besar Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK C) angkatan 2013 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan semua angkatan 2013 terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup saya dan akan selalu menjadi kenangan.
12. Teman-teman KKN-R Angkatan 55 Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, khususnya Posko 7 Pajalele Desa Binanga Karaeng yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.

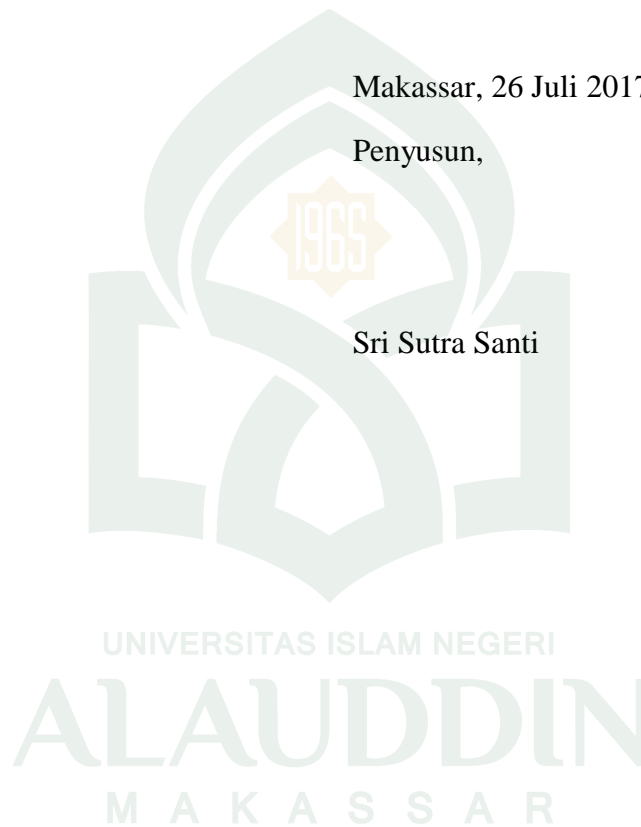
13. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 26 Juli 2017

Penyusun,

Sri Sutra Santi



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14-49
A. Pengertian Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAMA Indonseisa... 14	
B. Bantuan Hukum dan Dasar Bantuan Hukum	16
C. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusional	33
D. Hak Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50-54
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Metode Pendekatan	50

C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
G. Pengujian Keabsahan Data.....	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 55-81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin	59
C. Bentuk Perwujudan Hak Asasi Manusia terhadap Fakir Miskin dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
D. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Fakir Miskin.....	79
 BAB V PENUTUP.....	 82-83
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi Penelitian.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	 84-85
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Sri Sutra Santi
Nim : 10300113150
Judul : Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam

Pokok-pokok masalah penelitian ini yaitu : untuk mengetahui peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di kantor PBHI wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di Jl. Topaz Raya, Kompleks. Ruko Zamrud Blok B/16.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dan telah melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai lembaga bantuan hukum (LBH) seperti perannya sebagai *public service* (pelayanan publik), *social education*, *practical training*, nasehat hukum, bimbingan hukum, dan pemberi informasi hukum. 2) Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam adalah PBHI menjamin hak asasi manusia, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap fakir miskin sesuai hak-hak asasi manusia yang di lindungi oleh hukum Islam yaitu berhak mendapat keadilan hukum. Terkait dengan perannya PBHI sendiri sebagai lembaga bantuan hukum yang bergelut dalam bidang hak asasi manusia telah mewujudkan hak-hak masyarakat kurang mampu yang meminta pendampingan hukum. 3) Faktor yang menjadi kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin adalah terdapat pada kelengkapan berkas yang diajukan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyuluhan hukum, akses informasi yang tidak mudah serta masalah dana yang kurang memadai.

Implikasi penelitian ini adalah Pemerintah di harapkan memberikan perhatiannya terkait kendala PBHI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum yaitu dengan mempermudah akses informasi, pengetahuan masyarakat mengenai penyuluhan hukum dan di harapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar dapat memberikan dana yang lebih maksimal lagi untuk menunjang proses penyelesaian perkara terhadap masyarakat kurang mampu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Dalam negara hukum, Negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai juga dengan persamaan perlakuan. Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, tidak hanya orang yang mampu yang dapat memperoleh pembelaan diri dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.² Berdasarkan ketentuan pasal tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik fakir miskin. Penegasan dari pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Atas dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh Advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan sama seperti orang mampu yang mendapat jasa hukum dari advokat (legal servis).

¹Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang di Beri* (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), h. 2.

²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 72.

Bantuan hukum (*legal aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu agar mereka bisa memperoleh keadilan yang sama dengan orang yang keadaan ekonominya sudah mapan. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* (hak untuk dibela advokat) sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *United Nation Declaration Of Human Rights* (Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia) dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh advokat.³

Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan dihadapan hukum yang perlu diatur dalam Undang-Undang, karena fakir miskin yang frustrasi akan membahayakan kepentingan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang bantuan hukum diharapkan suatu hari nanti dapat merekayasa masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum bagi fakir miskin.

Islam juga mengajarkan tentang Hak Asasi Manusia, tetapi Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan hanya menahan diri dari menyentuh Hak-Hak Asasi Manusia tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Selain dari itu Hak Asasi Manusia dalam Islam juga mengandung prinsip tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-*

³Frans Hendra Winarta, *Advokat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 29.

insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan).⁴ Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal tersebut dinyatakan dalam QS al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyat yang menjadi hukum. Hal ini juga diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

⁴Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 52.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet.I; Bandung: Samil Qur'an, 2012), h. 107.

Dasar 1945 yang berbunyi : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hal tersebut perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang kurang menusiawi terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia miskin. Sehingga ini menjadi fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegak hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka/terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa. Dan bila hal ini terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk. Oleh karena masih banyaknya fakir miskin di Indonesia yang sangat memerlukan jasa bantuan hukum maka dengan adanya bantuan hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, cita-cita untuk mencapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai. Gerakan bantuan

hukum akan berhasil jika dilakukan secara nasional dengan dukungan pemerintah dan semua unsur masyarakat.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, jender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.⁶ PBHI wilayah Sulawesi Selatan semakin menonjolkan nilai-nilai dan respon baik dari kalangan masyarakat terkhusus pada wilayah Makassar, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang merasa mendapatkan kepuasan dan keadilan atas segala tindakan serta pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana Visi dan Misinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai “Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam

⁶Wikipedia, *Yayasan Bantuan Hukum Indonesia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia (4 Maret 2017).

Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam”. Yang bertempat pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok. B/16 Makassar Sulawesi Selatan.

2. Deskripsi Fokus

Adapun judul ini adalah “Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam”, dapat diberikan beberapa pengertian agar menghindari terjadi penafsiran yang keliru dari pembaca dalam pendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian dari beberapa variable yang dianggap penting, antara lain sebagai berikut:

- a. Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.⁷
- b. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan HAM.⁸
- c. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.⁹

⁷Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h. 1.

⁸Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (30 Mei 2017).

⁹Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 6.

- d. Konstitusional adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.¹⁰
- e. Fakir miskin artinya (1). Kaum fakir dan Kaum miskin, (2). Orang-orang yang sangat kekurangan.¹¹ Fakir dan miskin adalah orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
- f. Hukum Islam Istilah *hukum Islam* berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan Islam. ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.¹²

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan	Pengertian Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) adalah organisasi perhimpunan yang menaruh perhatian pada pemajuan penegakan hukum, bantuan dan pembelaan hukum, dan pemajuan

¹⁰Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), h. 1.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 321.

¹²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 401.

		<p>HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia - PBHI dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam - Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin
2.	Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Konstitusional Konstitusional adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara - Pengertian Fakir Miskin artinya (1). Kaum fakir dan Kaum miskin, (2). Orang-orang yang sangat kekurangan - Pengertian Hukum Islam Istilah <i>hukum Islam</i> berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan Islam. 'hukum' diartikan

		dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis
--	--	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam” dengan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin?
2. Bagaimana Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Julius Ibrani, dalam bukunya *Bantuan Hukum Bukan Hak yang diberi* adapun isi buku ini membahas tentang pelayanan bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyelesaian masalah hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta penyelesaian masalah hukum di luar proses pengadilan.¹³ Namun dalam buku ini tidak dibahas tentang peran-peran bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap fakir miskin.
2. Majda El-Muhtaj, dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* adapun isi bukunya membahas bahwa HAM itu sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, Batang Tubuh, maupun penjelasannya.¹⁴ Namun dalam buku ini tidak dijelaskan tentang hak-hak manusia dalam menerima bantaun hukum oleh advokat atau penasehat umum.
3. Efran Helmi Juni, dalam bukunya *Filsafat Hukum* adapun isi bukunya membahas tentang jasa hukum yang merupakan jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁵ Namun dalam buku ini tidak membahas

¹³Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang di Beri*, h. 76.

¹⁴Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 60.

¹⁵Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka setia, 2012), h. 344.

tentang upaya-upaya yang dilakukan advokat atau penuntut umum dalam memberikan bantuan hukum terhadap fakir miskin.

4. Didi Kusnadi, dalam bukunya *Bantuan Hukum dalam Islam* adapun isi bukunya membahas mengenai konsep bantuan hukum dan pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman, dan tujuan bantuan hukum dan pengacara.¹⁶ Namun, di dalam buku tersebut hanya menjelaskan mengenai bantuan hukum dari sisi objek pelaksanaannya yaitu pengacara.
5. Kurniati, dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* adapun isi bukunya berkaitan dengan salah satu misi kemanusiaan yang dianut dalam sistem hukum Islam yang menunjukkan betapa Islam menghargai dan memelihara hak asasi manusia pada setiap orang, walaupun legitimasi pemberian hak tersebut tidak terlepas dari kewajiban asasi manusia yang harus ditunaikan sebelum menuntut untuk mendapatkan hak.¹⁷ Namun, di dalam buku tersebut tidak membahas mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin beserta hak-hak fakir miskin dalam menerima bantuan hukum serta melindungi hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁶Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2012), h. 5.

¹⁷Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 6.

- a. Mengetahui peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin
- b. Mengetahui peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam
- c. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoretis maka skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya pada Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang adanya pemberian bantuan hukum terhadap fakir miskin yang dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.
- 2) Dapat memberikan sumbangsi pemikiran pada pihak yang terkait dalam pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dan adanya perlindungan hak asasi manusia yang diberikan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

1. Pengertian Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, gender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.¹

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, gender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.²

2. Fungsi dan peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

Berikut beberapa Fungsi dan Peranan lembaga bantuan hukum secara umum dan juga merupakan fungsi dan peran PBHI diantaranya:

1. *Public service* (Pelayanan publik)

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

¹ Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (30 Mei 2017).

² Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (30 Mei 2017).

2. Social education

Social education sangat berpengaruh dengan kondisi social kultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

3. Practical training

Fungsi ini tidak lebih penting bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

4. Nasehat Hukum

Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

5. Bimbingan Hukum

Bimbingan hukum diberikan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat atau pengetahuan hukum untuk semua jenis perkara atau kasus.

6. Pemberi Informasi Hukum

Pemberi Informasi Hukum mempunyai tugas memberikan informasi yang terkait dengan masalah hukum dan melakukan persiapan bahan pemberian materi hukum dan penyuluhan hukum.³

B. Bantuan Hukum dan Dasar Bantuan Hukum

1. Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁴

Bantuan hukum ini sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Dalam segi bahasa, dalam bahasa inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*) lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses

³Muhammad Darry, fungsi dan peranan lembaga bantuan hukum struktural, <http://web.unair.ac.id/artikeldetail>. (30 Mei 2017).

⁴Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h. 1.

mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di dihadapan hukum(*equality before the law*).

Sementara itu, dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) belum banyak dijelaskan, namun menurut para ahli hukum, ide bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17, bantuan hukum lebih dari sekedar ide atau cita-cita untuk mendapatkan keadilan tetapi ia telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga kemudian berkembang menjadi suatu institudi bantuan hukum.

Sedangkan dalam kajian hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disetarakan dengan *al-mahamy* yang dalam bahasa arab berarti pengacara. Dari konteks sejarah hukum Islam, istilah *mahamy* juga dekat maknanya dengan peranan kalangan penegak hukum di zaman awal perkembangan hukum Islam yakni *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih'alaib*, istilah tersebut hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa bantuan hukum.

Dalam ruang lingkup studi hukum Islam, perumusan norma-norma tentang bantuan hukum dapat ditemukan dalam sumber hukum Islam yang *dzanni* atau *dalil dagli*, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber hukum Islam yang *dzanni* atau *dalil aqli* yaitu ijtihad. Kedua sumber hukum ini menjadi landasan hukum adanya konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.⁵

⁵Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 48.

Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam, salah satunya terdapat dalam QS. Asy Syuura /42: 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁶

Berbicara mengenai bantuan hukum, hak asasi manusia (HAM) dan atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya manakala kita mengingat bahwa dalam membangun negara hukum memiliki beberapa ciri-ciri yang mendasar, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.⁷

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ar-Raafi, 2012), h. 487.

⁷H. Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 4.

Oleh karena itu, misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia (HAM).

Di dalam menjalankan bantuan hukum, Indonesia membentuk beberapa suatu organisasi bantuan hukum advokasi atau kepengacaraan syari'ah mulai dari *Balie van Advocaten* yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat membentuk wadah tunggal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Seolah tak ada akhir, perpecahan ditubuh organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan berdiri juga Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Knsultan Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).⁸

Program bantuan hukum bagi fakir miskin yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena dapat dimudahkan upaya-upaya misalnya terbinanya sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat.

Bantuan hukum (*legal aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu agar mereka bisa memperoleh keadilan yang sama dengan orang yang keadaan ekonominya sudah mapan. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak

⁸Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, h. 145.

asasi manusia yang dijamin dalam *United Nation Declaration Of Human Rights* di mana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh advokat.⁹

Tidak adil jika orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar jasa (*fee*) seorang advokat.

Perhatian terhadap masalah bantuan hukum menjadi relevan dan mengedepankan kita perbincangkan dalam konteks keindonesiaan, setidaknya di latar belakang oleh empat hal. *Pertama*, konteks bantuan hukum sendiri bukanlah konsep yang sudah mati, artinya hingga sekarang ini kita harus terus-menerus mengkajinya, karena bagaimanapun juga pergeseran dan atau perkembangan yang menyangkut dimensi waktu, pendekatan, sosial, politik, dan ekonomi, serta kondisi-kondisi lokal tentu memberikan pengaruh tersendiri. *Kedua*, semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang disertai dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum, perluasan spektrum fungsi dan peran profesi hukum, ataupun upaya-upaya dari penguasa untuk semakin menampilkan citra jalannya pemerintahan yang konstitusional yang semua itu pada gilirannya nanti akan turut mewarnai corak dan watak bantuan hukum. *Ketiga*, berkaitan erat antara hukum dengan masalah hak asasi manusia, meskipun dalam konteks yang luas masalah hak asasi manusia sebenarnya tidak hanya berkaitan erat dengan hukum, akan tetapi juga berkaitan erat dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. *Empat*, secara formal yuridis “jati diri” Negara Indonesia adalah sebuah

⁹Frans Hendra Winarta, *Advokat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 29.

negara hukum (*Rechtsstaat*). Dengan predikat negara hukum ini berimplikasi dengan menjadi terbatasnya perangkat kekuasaan ketatanegaraan oleh hukum.¹⁰

Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam peradilan pidana khususnya (*criminal justice system*), tidak terkecuali di Indonesia. **K. Smith dan D.J Keenan** berpendapat bahwa bantuan hukum (*legal aid*) diartikan sebagai :

...bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum maupun yang berupa kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.¹¹

Pada dasarnya, bantuan hukum terdiri atas dua konsep, yang pertama adalah konsep tradisional. Bantuan hukum dengan konsep ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini adalah pasif dan cara pendekatannya adalah formal legal. Dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatan hukum, pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dari tujuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan kaum miskin menurut hukum yang berlaku. Bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela.¹²

¹⁰H. Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 3.

¹¹Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 21.

¹²Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, h. 22.

Berdasarkan konsep bantuan hukum yang kedua adalah konsep konstitusional. Konsepnya adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas. Seperti usaha untuk menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sandi utama bagi tegaknya negara hukum.

Sifat dan jenis bantuan hukum ini lebih aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak secara individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan selain formal legal (seperti konsep bantuan hukum tradisional) juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetap ada juga jalur lain seperti jalur mediasi atau jalur damai. Oleh karena itu, aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, control terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.¹³

Sifat dasar dari bantuan hukum adalah membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Bantuan hukum sudah harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan asal usul dan sebagainya. Terkonsentrasinya advokat di kota-kota besar di Indonesia telah menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak memperoleh bantuan hukum secara wajar.¹⁴

¹³Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, h. 23.

¹⁴Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan* h. vii.

2. Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemberian bantuan hukum. Salah satu Undang-Undang yang pernah digunakan adalah UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang ini kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, kegiatan bantuan hukum secara yuridis formal sebagai kegiatan pelayanan hukum kepada orang-orang yang berhubungan dengan suatu perkara (hukum) merupakan bagian dari hukum positif Indonesia.

Adapun ketentuan yang khusus mengatur tentang bantuan hukum dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pada Bab XI mencakup pasal 56 sampai 57.

Bunyi dari pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 56.

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57.

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Secara khusus bantuan hukum terhadap fakir miskin diatur dalam Bab VI pasal 22. Untuk lebih jelas, berikut adalah bunyi dari pasal 22 tersebut:

Pasal 22 ayat (1)

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 22 ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Selain dari ketentuan-ketentuan tersebut, mengenai masalah pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai bantuan hukum tersebut, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan

¹⁵Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 297.

bantuan hukum dan wujud dari pada bantuan hukum itu sendiri. Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Walau pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 (1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- c. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan dari pada pemeriksaan, bukan untuk menyalagunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
- d. Wujud dari pada bantuan hukum.

Wujud dari pada bantuan hukum ini dimaksudkan adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa yaitu:

- 1) Pada Pasal 115, penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar, kecuali pada kejahatan terhadap keamanan negara, penasehatan hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar.

- 2) Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- 3) Pasal 79 jo Pasal 124, penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan di Praperadilan.
- 4) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa ssehubungan dengan Pasal 95, 97, Jo Pasal 79.
- 5) Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenag mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 156).
- 6) Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan (Pasal 182)
- 7) Penasehat hukum dapat megajukan banding (Pasal 223)
- 8) Penasehat hukum dapat mengajukan kasasi (Pasal 245).¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak juga memuat mengenai masalah pemberian bantuan hukum, diatur tentang pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, maupun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Berikut ini akan diuraikan pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Mengenai peraturan yang mengatur tentang pemberi bantuan hukum di atur dalam Pasal 8, 9, 10, dan Pasal 11. Di dalam pasal-pasal tersebut secara tegas dijelaskan

¹⁶KUHP & KUHP, Pustaka Mahardika, 2010, h. 190.

tentang pemberi bantuan hukum, hak pemberi bantuan hukum, serta kewajiban-kewajiban pemberi bantuan hukum.

- b. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum di atur dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- c. Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, yang menjelaskan secara rinci syarat-syarat dan tata cara pemohon bantuan hukum dalam memperoleh bantuan hukum.¹⁷

3. Pihak Pihak Pemberi Bantuan Hukum

Penasehat hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut.

a. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹⁸

b. Penasehat hukum resmi

Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975 setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut. Jadi misalnya seorang pengacara yang mendapat izin dari ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, hanya dapat memberikan bantuan hukum di wilayah Jakarta.

c. Penasehat hukum insidentil

¹⁷Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Pidana Anak 2012* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 107.

¹⁸Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*, h. 298.

Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan tingkat pertama. Mereka ini dapat terdiri dari sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, atau siapa saja yang sudah dewasa dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini tentunya terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah Pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut di berikan kepada setiap perkara yang ditangani.¹⁹

Menyangkut kelembagaan bantuan hukum, maka di Indonesia dalam sejarahnya wadah bantuan hukum yang pertama muncul adalah PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Kemudian dalam Kogres Persatuan Advokat Indonesia Tahun 1996 di Jakarta, telah disahkan berdirinya Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bagi kaum miskin di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, di Indonesia muncul berbagai nama organisasi bantuan hukum antara lain :

a. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

Nama Persatua Advokat Indonesia, lebih dikenal dengan nama singkatnya yakni peradin, yang di bentuk pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan kemudian diresmikan di Solo pada tanggal 31 Agustus 1964. Peradin merupakan organisasi advokat yang tertua setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Proyek besar Peradin ialah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, penggerak LBH Jakarta yang didirikan pada tahun 1970.²⁰

b. Asosiasi Advokat Indonesia

¹⁹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.

²⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat Dan Bantuan Hukum Indonesia Latar Belakang Dan Sejarah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 31.

Asosiasi ini merupakan wadah yang menaungi beberapa advokat yang profesional untuk menangani kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh para klien baik tergolong mampu ataupun yang tergolong tidak mampu. Organisasi ini melakukan upaya advokasi mengenai masalah perkotaan, seperti: pemukiman, dan lingkungan, layanan publik dan perlindungan konsumen, hak perempuan dan anak, serta ketenagakerjaan. Dan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu disediakan suatu pelayanan bantuan hukum yang bersifat *pro bono* (bantuan hukum secara cuma-cuma).

c. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

YLBHI ini terdiri dari beberapa LBH yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. LBH itu sendiri merupakan sebuah lembaga yang non-profit, yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, buta hukum dan tertindas. Arti cuma-cuma yaitu yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengacara, tetapi untuk biaya perasional seperti biaya perkara di pengadilan (apa bila kasus sampai di pengadilan) itu di tanggung oleh klien, itupun kalau klien mampu. Tetapi biasanya, LBH-LBH memiliki aturan sendiri dalam memilih kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi-misinya.²¹

d. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

PBHI merupakan salah satu lembaga yang difungsikan sebagai perkumpulan pembela hak asasi manusia, yang segala bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan yang serius adalah merupakan target advokasi. Dalam setiap advokasinya, PBHI terus berusaha mengikis habis tradisi lama yang terus

²¹Wikipedia, *Yayasan Bantuan Hukum Indonesia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia (4 Maret 2017).

berlangsung hingga hari ini, yakni sikap diam dan apatis terhadap pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan kondisi imunitas terhadap pelakunya. Di samping kantor pusat di Jakarta, PBHI sampai saat ini telah mempunyai 9 cabang di daerah. Setiap wilayah adalah otonom dalam memilih majelis dan anggota eksekutifnya serta merencanakan dan mengimplementasikan program-programnya. Sampai saat ini, cabang-cabang lain dan struktur jaringan kerjanya masih terus dibangun dan beberapa cabang yang sudah ada telah mampu mendapatkan dana reguler untuk program kerja mereka. Program kerja yang dilakukan merupakan pekerjaan kemanusiaan dan sukarela.²²

Peran advokat/pengacara yang berada di bawah wadah-wadah yang telah disebutkan di atas tentunya mempunyai kode etik dalam menjalankan tugas atau profesinya. Dalam hal pelayanan terhadap klien, dapat ditegaskan dalam pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang.
- d. Dalam menentukan honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.

²²Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (4 Maret 2017).

- g. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya.
- j. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.

Tugas seorang penasehat hukum atau pembela adalah memberikan bantuan hukumnya, berkewajiban serta bertanggung jawab membantu dan bukan mempersulit tugas penegakan hukum, apakah ditingkat penyidikan, penuntutan atau putusan.

Seorang advokat apabila dalam menjalankan tugasnya berusaha merugikan klien dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan di dalam Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Walaupun dalam Kode Etik Advokat tidak secara tegas menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat yang melakukan pelanggaran, tetapi secara implisit diakui bahwa bertanggungjawabnya advokat menurut Undang-Undang.²³

Syarat utama menjadi seorang penasehat hukum adalah harus seorang sarjana hukum. Menurut **Van Bermellen** seorang penasehat hukum dalam perkara pidana

²³ Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.100.

secara mutlak haruslah seorang sarjana hukum. Dikatakan lebih lanjut baik pada waktu pembentukan Undang-Undang maupun dalam praktik telah terdapat desakan agar orang-orang yang ahli dibidangnya dapat bertindak sebagai kuasa ataupun sebagai penasehat. Oleh karena itu para penasehat hukum sudah seharusnya adalah orang yang ahli di bidangnya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Agar advokat dapat bekerja sesuai dengan profesinya, dilakukan pengawasan berupa tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar ia menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Oleh karena itu, advokat diberi hak pembelaan diri untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesinya.

Penindakan terhadap advokat dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.

²⁴Hamrat Hamid, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 139.

- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan.
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah atau janji advokat atau kode etik profesi.²⁵

Seorang advokat atau pengacara memiliki hak-hak tersendiri, misalnya berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawab di dalam sidang pengadilan, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Seorang advokat bebas untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.²⁶

C. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusional

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusional

Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam menjelaskan pengertian HAM yaitu Menurut bahasa, hak asasi manusia (HAM) terdiri dari tiga kata, yakni: “hak” berarti, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.²⁷ Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2) kepunyaan, milik (3)

²⁵Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 298.

²⁶Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, h. 297.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 334.

kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya (5) kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar, pokok tindakan itu melanggar hak manusia.²⁸ Hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan serta hak-hak lain yang sesuai.²⁹ “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berlaku budi.³⁰

Menurut Istilah, HAM merupakan statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, baik laki-laki maupun wanita tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.³¹

HAM yang dikemukakan oleh Harun Nasution adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka dipandang perlu unruk mencapai harkat kemanusiaan, yaitu hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya merupakan suatu hak atau kepunyaan seseorang yang sama sekali tidak dapat ditarik dari dalam diri seseorang.³²

Seiring dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Masdar F. Mus’udi hak asasi manusia (HAM) adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia dan tidak ada ketentuan apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak tersebut. Hak asasi ini

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 60.

²⁹Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 19.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 628.

³¹Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. h. 20.

³² Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1987), h. 19.

tidak menuntut positivisme, yaitu tidak menuntut keharusan untuk dimuat dalam Undang-Undang atau konstitusi.³³

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian tersebut dapat di baca di dalam ABC, *Teaching Human Rights, United Nations*, p.5 yang merumuskan, “ *Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”.³⁴

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa pencipta hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.³⁵ Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental itu adalah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua dasar hak inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi lainnya sulit akan ditegakkan. Hak asasi manusia dalam pengertian modern adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu.³⁶ Dengan demikian

³³Masdar F. Mus'udi, *Agama dan Hak Rakyat* (Jakarta: Guna Aksara, 1993), h. 45.

³⁴Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 1.

³⁵Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 179.

³⁶Ramdlon Naning, *Cita & Citta HAM di Indonesia* (Cet. I; Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), h.7.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hak melekat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dinikmati guna mencapai harkat kemanusiaan.

Dalam hal ini dijelaskan pula mengenai konstitusional dan konstitusional adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.³⁷ Perilaku konstitusional harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan warga negara secara seimbang. Untuk mengembangkan perilaku konstitusional, pertama kali dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam UUD 1945. Salah satu perilaku konstitusional warga negara adalah menghargai hak asasi orang lain.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) konsep konstitusionalisme yang menjadi benang merah, yang merupakan pembatas terhadap kekuasaan pemertintah serta perlindungan terhadap individu rakyat atau negara. Perkembangan konsep konstitusionalisme ini lahir dengan lebih memberikan perhatian pada isu perlindungan terhadap HAM dan perlindungannya secara institusional oleh badan yudisial.

Pada konsep konstitusionalisme modern adalah *limited government* (pemerintahan yang terbatas), hakikat pemerintahan yang terbatas dinyatakan lebih spesifik dengan memberi penekanan pada aspek perlindungan HAM kepada rakyat/warga negara dan perlindungan secara institusional oleh badan yudisial. Perlindungan HAM kepada rakyat/warga negara, dapat didedukasikan dari gagasan tentang keadilan. Konstitusi yang adil adalah pemerintah yang terbatas, konstitusi

³⁷ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 1.

sebagai hukum, untuk dapat berlaku atau mengikat yang memiliki basis legitimasi yang akseptabel, bukan semata-mata karena kekuasaan.

Perlindungan terhadap martabat manusia (*human dignity*) melalui HAM adalah tuntutan keadilan yang universal dari perspektif negatifnya, artinya, saat ini setiap orang dapat dengan mudah menghasilkan konsensus bahwa perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia, pelanggaran HAM adalah ketidakadilan sangat serius yang tidak boleh terjadi.

Dengan demikian, perlindungan terhadap HAM adalah tuntutan absolut keadilan karena kondisi sebaliknya, ketidakadilan, tidak dikehendaki. Bukti bagi pernyataan ini adalah lahirnya berbagai gerakan sebagai berikut: Pertama, konstitusionalisasi dan internasionalisasi HAM yang menentukan aspek hukum substantif bagi ruang lingkup HAM. Kedua, pembentukan institusi dan mekanisme nasional maupun internasional untuk perlindungannya baik yudisial maupun non yudisial. Ketiga, *corretive justice* atas ketidak adilan yang ditimbulkan melalui berbagai praktik pelanggaran terhadap HAM baik masa lalu maupun masa kini dalam bentuk *responsibility* dan *liability* pelaku individual dan negara.

Berdasarkan tuntutan keadilan yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat berlaku sebagai konsep konstitusionalisme dinyatakan sebagai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan perlindungan HAM terhadap rakyat/warga negara (sesuai dengan asas-asas umum hukum HAM) dapat dibenarkan karena pengertian tersebut telah mengakomodasi cita hukum universal yaitu keadilan.³⁸

2. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hukum Islam

³⁸Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 27.

Hak Asasi manusia dalam Islam tertuang dalam transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya tugas yang diimbang tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensi tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri³⁹

Prinsip dasar dalam Hukum Islam itu adalah bahwa manusia mempunyai hak, dan dalam hal-hal tertentu merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar dirinya, dan berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan. Tetapi ia harus melakukan itu semua sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan orang lain, yang mungkin ditimbulkan ketika orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini harus di ciptakan suatu ikatan sosial (*social cohension*), saling tolong menolong, dan kerja sama antar umat manusia dalam mencapai tujuan mereka. Mempertimbangkan itu semua, di mana kebaikan dan keburukan, keberuntungan dan kerugian tidak mungkin dicampuradukan.⁴⁰

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia. Persamaan, artiya islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya

³⁹M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 12.

⁴⁰Harun Nasution & Bahtiar Effendy, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam* (Cet: I ;Jakarta: 1987), h. 171.

hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS al-Hujurat 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah melekatkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, anantara lain:

- a. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surah al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
- b. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surah al-Hujurat ayat 13.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 517.

- c. Al-Qur'an telah menegakkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata '*adl, qisth* dan *qishash*.
- d. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh al-Kahfi ayat 29.⁴²

Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad Saw telah memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau:⁴³

“Barang siapa yang mengzalimi seseorang mu'ahid (seseorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesangguaannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam piagam madinah dan khutbah wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan nabi ini kemudian menjadi *masterpeacanya* HAM dalam perspektif Islam.

Piagam madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di madinah dalam menegakkan ikatan persamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan islam yang terdiri dari golongan anshar dan muhajirin, golongan yahudi dan para

⁴²Harun Nasution & Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia Dalam*, h. 172.

⁴³T. Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Mnausia* (Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1999), h.23.

penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Prakteknya, nabi saw mempererat persaudaraan muhajirin dan anshar berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagam madinah tersebut.

Adapun inti dari piagam madianah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, kebebasan, toleransi agama, perdamaian, tolong menolong, dan membela yang teraniaya serta mempertahankan madinah dari serangan musuh.⁴⁴

Di samping prinsip-prinsip madinah seperti yang telah disebutkan Negara-negara Islam juga merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang islami, artinya mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada:

a. Deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia (HAM)

Deklarasi ini disusun dalam komferensi Islam di mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah Swt, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah teksnya memuat acuan-acuan gambling dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan

⁴⁴Eggi Sudjana, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 89.

sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.⁴⁵

Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa:

- 1) Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a).
- 2) Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d).
- 3) Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b)
- 4) Setiap berhak dan berkewajiban menolak untuk mentaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya (pasal IV c).⁴⁶

b. Deklarasi Cairo

Deklarasi ini dicetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran sentral syari'at Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman itu sendiri, terutama ada dua pasal terakhirnya yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syari'at Islam, syari'at Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini (pasal 23 dan 24).⁴⁷

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 498.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 498.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 499.

Skema kehidupan yang digambarkan Islam terdiri dari serangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia, setiap orang yang menerima agamaini, adalah terikat oleh dua hal itu. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban untuk manusia, yaitu : 1) hak Tuhan di mana manusia diwajibkan untuk memenuhinya, 2) hak manusia atas dirinya sendiri, 3) hak orang lain atas diri seseorang, 4) hak kekuatan dan sumber-sumber (alam) yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. Hak-hak dan kewajiban ini merupakan dasar (ajaran) Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memahaminya dan mematuhi dengan baik.⁴⁸

Adapun hak-hak asasi manusia yang di lindungi oleh hukum Islam antara lain:

a. Hak hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam dianatara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah pembalasan bagi pembunuhan dan kejahatan lainnya diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seseorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.⁴⁹ Dalam QS Al-Israa'/17: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar,⁵⁰

⁴⁸Harun Nasution & Bahtiar Effendy, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam* . h. 173.

⁴⁹Hasyim Aidid, *Studi Krisis Penegakan Hukum dan HAM Pada Komplik Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 65.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 285.

b. Hak Kebebasan Beragama

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia (HAM), termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 256:


 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.⁵¹

c. Perlindungan kehormatan

Kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun, dan mereka terikat dengan untuk menjaga kehormatan orang lain. Negara Islam juga terikat harus melindungi kehormatan warga negara tanpa diskriminasi apapun.

d. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang.

e. Keamanan kemerdekaan pribadi

Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tidak ada seorangpun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 42.

f. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tidak kejahatan atau pelanggaran yang tidak diperbuatnya.

g. Hak untuk memprotes kezaliman (tirani)

Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah.

h. Kebebasan ekspresi

Islam juga menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.

i. Kebebasan hati nurani dan keyakinan

Agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia.

j. Hak keadilan hukum

Hak ini adalah suatu hak yang sangat penting dimana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap orang sebagai umat manusia.⁵²

Kemerdekaan beragama terwujud dalam bentuk-bentuk yang meliputi antara lain.⁵³

Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk meninggalkan suatu agama yang diyakininya,

⁵²Hasyim Aidid, *Studi Krisis Penegakan Hukum dan HAM Pada Komplik Sosial*, h. 66.

⁵³Dalizar Putra, *Hak Asasi Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), h. 59.

Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-Islam (Ahli kitab) untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketiga, Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta berpendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan.

Islam telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Hal ini tercermin dalam bentuk larangan memaki sembah agama lain, meskipun menurut pandangan Islam hal itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah Swt.

D. Hak Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo atau pro bono publico*) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.⁵⁴

Salah satu asas hukum pidana yang paling penting adalah bahwa setiap orang yang berperkara dalam persidangan wajib diberikan bantuan hukum. Hal ini demi menjamin hak-hak orang tersebut dalam melakukan pembelaan dipersidangan. Secara

⁵⁴Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 162.

umum ketentuan bantuan hukum sudah cukup baik. Namun dalam hal pelaksanaan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu masih mengalami beberapa kendala.

Sebagai wujud kewajiban Negara dalam melindungi warga negaranya, maka sudah seharusnya Negara juga memiliki kewajiban terhadap warga negaranya yang tersangkut masalah dalam proses peradilan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingan seorang diri. Negara Indonesia yang menganut paham sebagai Negara kesejahteraan yaitu Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya maka sudah seharusnya Negara wajib menjamin hak-hak orang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hukumnya. Kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang penting karena hal tersebut telah diamanatkan oleh konstitusional.⁵⁵

Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan kuat adalah Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁵⁵Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 164.

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, baik orang mampu maupun orang fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal-pasal dalam konstitusi tersebut telah mengamanatkan dapat secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.

Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, hak sosial, hak budaya (ekosob), hak sipil, dan hak politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) yang dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan baik dari advokat maupun pembela umum melalui suatu program bantuan hukum.⁵⁶

Berkaitan dengan hak-hak fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum dalam Al-Qur'an juga terdapat penjelasan tentang fakir miskin salah satunya terdapat dalam QS Al-Israa'/17: 26:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا



⁵⁶Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 166.

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁵⁷

Dari ayat tersebut di atas di jelaskan bahwa seorang muslim memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin dan orang yang telah dalam perjalanan dan hak yang harus dilakukan oleh orang muslim terhadap keluarga dekat, orang miskin dan orang yang telah dalam perjalanan adalah mempererat tali persaudaraan dan tali kasih sayang, serta membantu keringanan beban penderita yang mereka alami.

Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin atau orang yang tidak mampu, yang harus dijamin perolehannya oleh negara. Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus diartikan statis. Artinya, kalau ada persamaaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu mempunyai masalah hukum, maka orang dapat

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 284.

menunjuk satu orang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan diri seorang atau lebih pembela umum (*publik defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.⁵⁸



⁵⁸Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 172.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah field research kualitatif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan terkhusus pada wilayah Makassar Jl. Topaz Raya, Kompleks. Ruko Zamrud Blok B/16.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan *perundang-undangan* dan *penetapannya*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Wilayah Sul-Sel dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun

langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sul-Sel dan didukung oleh data kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.¹ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

¹Moechar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002), h. 143.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.² Penggunaan metode observasi dalam penelitian mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Metode observasi ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia wilayah Sul-Sel.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan untuk meneliti adalah sebagai berikut:

a. Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

b. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

²Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.54.

c. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1) *Editing* data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2) *Coding* data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³ Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

³Lexy J.Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Singkat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, gender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.¹

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan didirikan pada 5 November 1996 di Jakarta melalui Kongres yang di dirikan secara tim yang terdiri dari beberapa advokat senior seperti Luhut M. P Pangaribuan, Mulyana W, Kusumah, Permadi, Trimedya Panjaitan, Syarifuddin Sudding dan para advokasi lainnya. Advokat tersebut terdiri dari berbagai kalangan yang menjadikan PBHI sebagai wadah perhimpunan bagi setiap orang yang peduli terhadap hak-hak manusia untuk semua (*human rights for all*).²

PBHI terdaftar sebagai organisasi perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta dan tersebar melalui perhimpunan wilayah dengan anggota lebih 1.000 orang. PBHI tersebar dari beberapa wilayah yang mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat,

¹ Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (30 Mei 2017).

² Abdul Aziz Saleh (36 tahun), Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 23 Januari 2017.

Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.³

Terkhusus Kepemimpinan PBHI wilayah Sulawesi Selatan yang sekarang ini beralamat di Jl. Topaz Raya, Kompleks. Ruko Zamrud Blok B/16 di mulai dari Syarifuddin Sudding, SH., MH Ketua pertama untuk periode 1996-2000, Syamsuddin Radjab, SH., MH untuk periode 2000-2005. Ketua berikutnya adalah Agus Haikal, SH untuk periode 2005-2010, Wahidin Kamase, SH periode 2010-2015, dan saat ini jabatan Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan diduduki oleh Abdul Aziz Saleh, SH.

Sebagai kantor cabang dari PBHI maka PBHI wilayah Sulawesi Selatan memiliki visi misi yang sama sebagai sebuah organisasi perkumpulan yang menginginkan pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia terpenuhi dan memberikan bantuan hukum secara suka rela terhadap orang-orang yang kurang mampu.

2. Visi dan Misi PBHI wilayah Sulawesi Selatan

a. Visi PBHI wilayah Sulawesi Selatan:

Visi dari PBHI wilayah Sulawesi Selatan adalah Negara (*state*) menunaikan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Implementasi kewajiban negara tidak hanya ditempuh tanpa diskriminasi, namun juga afirmatif terhadap kelompok yang lemah dan yang mengalami diskriminasi.

b. Misi PBHI wilayah Sulawesi Selatan:

Misi dari PBHI wilayah Sulawesi Selatan adalah mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak manusia, membela para korban pelanggaran, serta mendidik anggota dan calon anggota sebagai pembela hak-hak manusia. Setiap orang harus

³Abdul Aziz Saleh (36 tahun), Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 24 Januari 2017.

diperlakukan setara dalam hukum dan perlakuan tanpa peduli asal-usul dan warna. Setiap korban pelanggaran hak-hak manusia membutuhkan uluran tangan dan solidaritas. Dan untuk itu pula diperlukan pembela hak-hak manusia.⁴

3. Wilayah Kerja PBHI Sulawesi Selatan

Wilayah kerja PBHI Sulawesi Selatan terdapat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.⁵

4. Pengalaman Organisasi PBHI wilayah Sulawesi Selatan

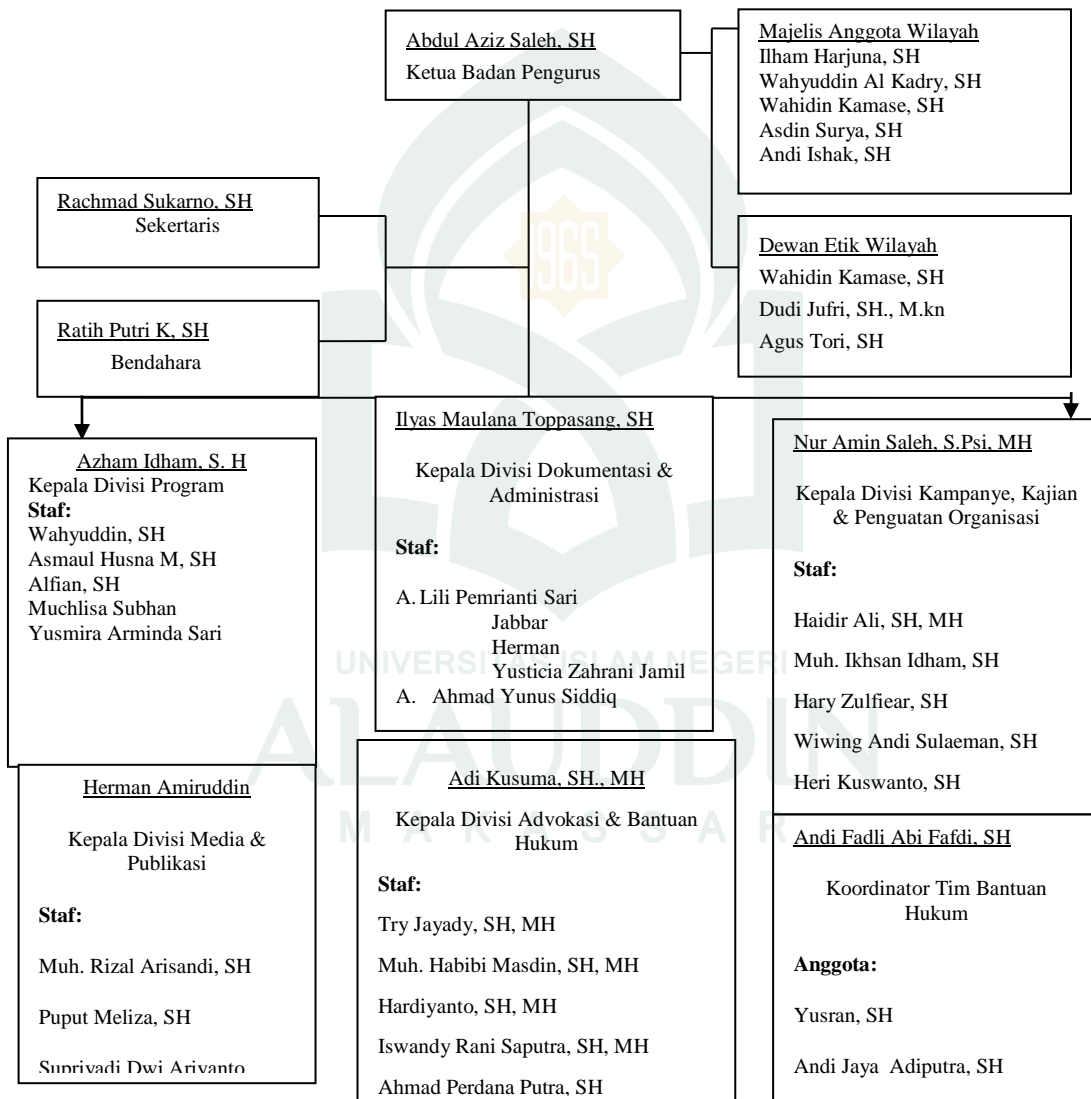
Pengalaman Organisasi, PBHI wilayah Sulawesi Selatan sejak berdiri hingga pada perkembangannya telah beberapa kali melaksanakan dan terlibat dalam melaksanakan kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan hukum seperti melakukan penyuluhan hukum di Lapas, melakukan sosialisasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum di daerah-daerah maupun di kampus-kampus yang berada di Sulawesi Selatan serta penanganan atau pemberian bantuan Hukum cuma-cuma

⁴Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (30 Mei 2017).

⁵Adi Kusuma (28 tahun), Kepala Devisi Advokasi dan Bantua Hukum PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 27 Januari 2017.

(Prabono) Secara langsung terhadap masyarakat tidak mampu baik itu non litigasi maupun litigasi.⁶

5. Susunan Pengurus dalam Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut:



⁶Rachmad Sukarno, (29 tahun), Sekretaris PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 23 Januari 2017.

B. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin

Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri dengan berlandaskan hukum dan berpenduduk menurut data statistik sekarang ini sebanyak 254,9 juta dengan tingkat pendapatan ekonomi kebanyakan penduduknya saat ini masih bisa dikatakan di bawah rata-rata. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemui sangatlah rentan dengan adanya diskriminasi hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri bahkan tidak jarang sering ditemui perkataan-perkataan yang terlontar dari mulut masyarakat yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu hanyalah untuk golongan masyarakat kelas atas tidak untuk masyarakat golongan bawah atau dengan kata lain “Hukum Indonesia Tumpul ke Atas tapi Tajam Ke bawah” sementara telah tertuang dengan jelas bahwa dalam Negara hukum, Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Persamaan dihadapan hukum tersebut mengimplikasikan suatu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum. Tetapi di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin disebabkan tingkat pengetahuan maupun ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (buta hukum), sementara tak sedikit organisasi yang di dalamnya berkecimpung para advokat yang memposisikan diri sebagai lembaga bantuan hukum (LBH) menetapkan atau memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin yang terlibat kasus hukum disediakan suatu lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum tanpa jasa *fee* (tanpa bayar). Lembaga tersebut salah satunya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah agar setiap keluhan dan laporan masyarakat langsung bisa ditampung dan dilayani.

Dari berbagai penjelasan tersebut terdapat beberapa Fungsi dan Peranan lembaga bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. *Public service* (Pelayanan publik)

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

Begitupun dengan PBHI sebagai salah satu lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hak konstitusi pada masyarakat fakir miskin yang banyak kurang mampu yang memerlukan jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma. Terkait dengan peran tersebut PBHI tentu menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan Abdul Aziz Saleh, SH, mengatakan bahwa PBHI merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat secara gratis atau cuma-cuma dalam menangani kasus-kasus hukum, dan hingga saat ini tidak sedikit jumlah masyarakat yang telah mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dari PBHI sehingga mereka dapat keluar dari masalah hukum yang menjeratnya.⁷

⁷Abdul Aziz Saleh (36 tahun), Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 23 Januari 2017.

Dg. Ati merupakan salah satu klien dari PBHI yang telah diberi bantuan hukum mengatakan sangat berterima kasih kepada pihak PBHI yang telah memberi bantuan hukum dan telah membantu menyelesaikan perkaranya dengan tidak membebankan biaya sepeser pun kepadanya, dan juga mengatakan bahwa dengan adanya lembaga bantuan hukum (LBH) ini masyarakat yang kurang mampu sangat merasa terbantu.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PBHI sebagai salah satu lembaga bantuan hukum (LBH) sudah berperan dalam proses pemberian bantuan hukum dan sebagai pengawal konstitusi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. *Social education*

Social education sangat berpengaruh dengan kondisi social kultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut PBHI wilayah Sulawesi Selatan telah beberapa kali melaksanakan dan terlibat dalam melaksanakan kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan hukum seperti melakukan penyuluhan hukum di Lapas, melakukan sosialisasi hukum di daerah-daerah serta PBHI juga melakukan penyuluhan hukum di salah satu kampus di Makassar tepatnya di Universitas Muslim Indonesia (UMI).

⁸Dg. Ati (56 tahun), Klien dari PBHI, Wawancara, Makassar 20 Juni 2017.

Salah satu mahasiswa UMI M.Irsan Mulia Nasir jurusan Hukum mengatakan bahwa dia pernah menghadiri penyuluhan hukum yang di kampusnya yaitu kampus UMI diadakan oleh PBHI terkait materi tentang bantuan hukum dan merasa mendapat pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah di dapatkan dalam materi perkuliahan.⁹

3. *Practical training*

Fungsi ini tidak lebih penting bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

4. Nasehat Hukum

Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

5. Bimbingan Hukum

Bimbingan hukum diberikan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat atau pengetahuan hukum untuk semua jenis perkara atau kasus.

⁹M.Irsan Mulia Nasir (19 tahun), Mahasiswa UMI Jurusan Hukum, Wawancara, Makassar 1 Juli 2017.

6. Pemberi Informasi Hukum

Pemberi Informasi Hukum mempunyai tugas memberikan informasi yang terkait dengan masalah hukum dan melakukan persiapan bahan pemberian materi hukum dan penyuluhan hukum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas merupakan fungsi dan peranan lembaga bantuan hukum (LBH) secara umum yang telah di laksanakan oleh PBHI terkait perannya sebagai lembaga pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dan telah terealisasi sesuai dengan Undang-Undang.

Ada beberapa kategori kasus yang tidak dapat ditangani oleh pihak PBHI diantaranya adalah kasus pelanggaran Hak Asasi manusia, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku korupsi, pelaku narkoba, dan pelaku asusila. Selain dari beberapa kategori kasus yang disebutkan PBHI dapat membantu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum terutama bagi masyarakat kurang mampu baik itu kasus litigasi maupun non litigasi.

Data yang penulis peroleh di lapangan yang dilakukan di Kantor PBHI wilayah Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2016 hingga sekarang, PBHI wilayah Sulawesi Selatan sudah menerima berbagai jenis pengaduan kasus yang dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰Muhammad Darry, fungsi dan peranan lembaga bantuan hukum struktural, <http://web.unair.ac.id/artikeldetail>. (30 Mei 2017).

TABEL 1
JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI)
WILAYAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

No.	NAMA	JENIS KASUS	SANGKAAN	STATUS
1.	Muh. Fiqri Haikal Zulfan	Litigasi	Dugaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana	Terdakwa
2.	Andri Wanto Rombe	Litigasi	Dugaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHPidana	Terdakwa
3.	Andi Muh. Taufan. S	Litigasi	Dugaan Pasal 44 Ayat (1)UU No. 23 Thn 2004 ttg KDRT	Terdakwa
4.	Dg. Ati	Litigasi	Dugaan Pasal 44 Ayat (1)m UU No. 23 Thn 204 ttg KDRT	Terdakwa
5.	Riswandi	Litigasi	Dugaan Pasal 363 Ayat (1)ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana	Tersangka
6.	Andi Herman	Litigasi	Dugaan Pasal 372 KUHPidana	Tersangka
7.	Agus Salim S	Litigasi	Dugaan Pasal 374 KUHPidana	Tersangka

8.	Ahmad Rahim	Litigasi	Dugaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, ke 4 dan ke 5 Jo 55, 56 KUHPidana	Tersangka
9.	Sulaiman Bin Sirajuddin	Litigasi	Dugaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951	Tersangka
10.	Kamaruddin	Litigasi	Dugaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e , ke 4 dan ke 5 KUHPidana	Tersangka
11.	Lalu Prasjabudi	Litigasi	Dugaan Pasal 49 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 ttng KDRT atau Kedua Pasal 77 B UU RI No. 35 Thn 2014 ttg Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002	Terdakwa
12.	Wahyudi N	Litigasi	Dugaaan Pasal 35 Ayat (3) sub. 36 Ayat (1) Jo. Psl 26 Ayat (1) UU RI No. 7 Thn 2011 ttg Mata Uang atau Pasal 244 KUHPidana sub. Pasal 245 KUHPidana	Terdakwa

13.	Rismawati Husman Sam	Litigasi	Perceraian	Penggugat
14.	Rezki Anggaraeni Syam, SH	Litigasi	Perceraian	Termohon
15.	Sumarno	Non Litigasi	Dugaan Tindak Pidana Perbankan Ttg Kerahasiaan Nasabah	Pelapor
16.	Baeda Dg Sakking	Non Litigasi	Dugaan Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemaksaan	Pelapor
17.	Abd Rasyid T	Non Litigasi	Dugaan Tindak Pidana Pencatutan Nama	Pelapor
18.	Sattu	Non Litigasi	Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	Terlapor
19.	Rusman	Non Litigasi	Dugaan Tindak Pidana 351 Ayat (1) KUHPidana	Korban

20.	Abd Rajab dkk	Non Litigasi	Dugaan PHK sepihak oleh PT. Bintang Jaya Sakti	Pendampingan
21.	H. Muh Awaluddin	Non Litigasi	Korban Terhadap PT Asuransi Oto Finance	Pendampingan
22.	Sudianti dan Dkk	Litigasi	Procedure Ijin IMB	Penggugat

Sumber data: Dokumen Kantor PBHI Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2016 jumlah perkara yang diterima oleh PBHI sebanyak 22 kasus yang merupakan kasus *non profit* atau kasus yang ditangani secara gratis atau cuma-cuma dan merupakan kasus litigasi dan kasus non litigasi. Kasus litigasi yang ditangani selama tahun 2016 sebanyak 14 kasus dan kasus yang non litigasi yang ditangani sebanyak 7 kasus.

TABEL II
JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI)
WILAYAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

No.	NAMA	JENIS KASUS	JENIS PERKARA	STATUS
1.	Andi Fitriani	Litigasi	Perdata	Penggugat

2.	Edi Bin Bakaring	Litigasi	Pidana	Tersangka
3.	Sofyan	Litigasi	Pidana	Terdakwa
4.	Yuliana	Litigasi	Perdata	Terdakwa
5.	Baniral Asmaul Husna	Litigasi	Pidana	Tersangka
6.	Aripuddin	Litigasi	Pidana	Terdakwa
7.	Wahyudin Budiman Bin Wasisno	Litigasi	Pidana	Terdakwa
8.	Kristianus Jemi Lay	Litigasi	Pidana	Tersangka
9.	Kursiah	Litigasi	Pidana	Tersangka
10.	Trisiano Bin Nyala	Litigasi	Pidana	Tersangka
11.	Egi Alif Bin Muhammadong	Litigasi	Pidana	Terdakwa
12.	Muhammad Idris Saputra Bin Ismail	Litigasi	Pidana	Terdakwa
13.	Fadhil	Litigasi	Pidana	Tersangka
14.	Randi Purnama	Litigasi	Pidana	Terdakwa
15.	Irwan Ibrahim	Litigasi	Pidana	Terdakwa

Sumber data: Dokumen Kantor PBHI Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017.

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa selama tahun 2017 jumlah perkara yang diterima oleh PBHI sebanyak 15 kasus dan juga merupakan kasus *non profit* atau kasus yang ditangani secara gratis atau cuma-cuma dan kasus tersebut lebih dominan ke kasus litigasi.

TABEL III
JUMLAH PUTUSAN KASUS YANG DI TANGANI
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI)
WILAYAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2017

No	NAMA KLIEN	PASAL YANG KENAKAN	KETERANGA N
1.	Andri Wanto Rombe	Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana	Amar putusan 6 bulan
2.	Andi Muh Taufan	UU no.23 tahun 2004 tentang kdrt/pasal 351 ayat (1) KUH Pidana	Amar putusan 1 tahun 3 bulan
3.	Sulaiman Bin Sirajuddin	Pasal 2 ayat 1 uu darurat No. 12 thn 1951	Amar putusan 5 bulan 15 hari
4.	Dg. Ati	Pasal 44 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Amar putusan pidana penjara 4 bulan 15 hari
5.	Lalu Prasjabudi	Pasal 49 Huruf a UU RI No. 23 tahun 2004	Amar putusan 5 bulan
6.	Dandi	Pasal 363 ayat 1	Amar putusan 8 bulan 20 hari
7.	Kamaruddin	Pasal 363 ayat 1	Amar putusan 1 tahun 2 bulan
8.	Wahyudi N	Pasal 36 Ayat (1) Jo	Amar putusan

		Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 Thn 2011 ttg Mata Uang	1 tahun 1 bulan
9.	Sumarno	Tindak Pidana Perbankan Ttg Kerahasiaan Nasabah	Amar putusan 5 bulan 12 hari
10.	Baeda Dg Sakking	Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemaksaan	Amar Putusan 8 bulan
11.	Abd Rasyid T	Tindak Pidana Pencatutan Nama	Amar Putusan 5 bulan 11 hari
12.	Arjun	Pasal 170 Jo Pasal 35 ayat (1) KUHPidana	Amar Putusan 1 tahun 12 hari
13.	Riswandi	Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 ayat (1) KUHPidana	Amar Putusan 7 bulan
14.	Ikbal Nasri	Pasal 365 ayat (1)	Amar utusan 10 bulan 16 hari
15.	Abd Rahmansyah Bin Jamal	Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana	Amar putusan 7 bulan 20 hari
16.	Akram Prawira Ibrahim	Pasal 363 ayat (1) ke 2e, dan 4e KUHPidana	Amar putusan 8 bulan
17.	Eko Purwanto	Pasal 372 KUHPidana	Amar putusan 1 tahun 2 bulan

Sumber data: Dokumen Kantor PBHI Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017.

Dari table 3 di atas terlihat bahwa ada 17 kasus yang ditangani PBHI dalam 2 tahun yaitu pada tahun 2016 sampai sekarang. Data tersebut di atas merupakan kasus yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma yang sudah sampai pada putusan.

Adi Kusuma, SH., selaku Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, mengatakan bahwa banyak kasus yang ditangani pada tahun 2017 ini, baik itu kasus Pidana maupun kasus Perdata, tetapi selain dari yang tercantum pada tabel tersebut masih ada yang dalam proses penanganan perkara, baik itu penanganan perkara Pidana maupun perkara Perdata.¹¹

Selanjutnya penulis akan menggambarkan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh PBHI wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu Kasus yang menimpa Perempuan dengan nama **DG. ATI** lahir di Makassar, umur 56 tahun beralamat di jalan Pampang Utama Lr 1 Kota Makassar yang dituntut telah melakukan tindak pidana **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus Dg.Ati ini PBHI wilayah Sulawesi Selatan melibatkan 18 Pengacara untuk mendampingi dan melakukan pembelaan hukum mulai dari tingkat Penyidikan di kepolisian, Kejaksaan dan sampai pengadilan yang dimana dalam Surat Perintah Penahanan di Kepolisian diduga telah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam

¹¹Adi Kusuma (28 tahun), Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 27 Januari 2017.

rumah tangga yang kemudian dikuatkan oleh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang sama serta Surat Tuntutan dengan bunyi menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa Dg. Ati dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Kemudian para Advokat PBHI menjawab dengan Nota Pembelaan (PLEDOI) yang isi pembelaannya berkesimpulan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Dg. Ati ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa telah berumur 56 tahun dan lanjut usia, mulai merasakan sakit-sakitan hingga Terdakwa membutuhkan perawatan yang rutin dari pihak keluarga atau medis, dan juga Para advokat PBHI bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan hati nurani hingga sisi kemanusiaan, agar terdakwa dapat berkumpul kembali dengan keluarganya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Selanjutnya perkara pidana yang menimpa perempuan dengan nama Dg. Ati setelah melalui proses persidangan akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Perempuan Dg. Ati ini dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Dg. Ati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karna itu dengan Pidana penjara selama 4 (bulan) 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah panci masak, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua ribu Rupiah)

Berdasarkan Amar Putusan Hakim tersebut maka perempuan dengan nama Dg. Ati ini tinggal menjalani hukuman 6 (hari) penahanan lagi sebelum bebas dikarenakan pemotongan masa tahanan yang telah dijalani dan oleh putusan ini para Advokat PBHI tidak melakukan Tindakan Banding.¹²

Selanjutnya pula contoh kasus non litigasi yang akan sedikit penulis singgung disini yakni kasus pendampingan masyarakat di daerah Seko pada tahun 2016 yang terdiri dari beberapa kampung yang menolak adanya pembangkit listrik di daerah mereka, juga pendampingan masyarakat petani sawit di daerah mamuju utara yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Sulawesi barat melawan tindakan sewenang-wenang salah satu tokoh masyarakat terhadap petani sawit dan beberapa pendampingan lainnya di tingkat kepolisian maupun dalam hal mediasi diluar yang tidak sampai ke pengadilan.

¹²Andi Arif Hardi, (34 tahun), Advokat PBHI wilayah Sulawesi Selatan, tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Makassar, 30 Januari 2017.

Dalam bidang HAM, PBHI juga berperan aktif dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Abdul Aziz Saleh, SH. mengatakan bahwa PBHI sebagai suatu lembaga sering kali berada paling depan dan bekerja sama dengan lembaga lainnya di Sulawesi Selatan dalam meneriakkan dan memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Terkhusus di Sulawesi Selatan PBHI sering kali mengadakan tentang penyuluhan Hukum maupun HAM terhadap masyarakat-masyarakat pinggiran atau kurang mampu bahkan pula tak pernah luput turun Aksi berbaur bersama para demonstiran pejuang HAM pada peringatan hari HAM sedunia, juga dengan tegas menyatakan menolak Adanya Penerapan hukuman Mati. Menolak adanya kekerasan fisik terhadap tersangka ataupun terdakwa atau dengan kata lain segala sesuatu yang melanggar HAM maka PBHI tak punya alasan untuk tak menentangnya.¹³

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa PBHI wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga bantuan hukum sudah berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, dan merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia.

¹³Abdul Aziz Saleh (36 tahun), Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 25 Januari 2017.

C. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia. Persamaan, artiya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS al-Hujurat 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah melekatkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 517.

serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad Saw telah memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau:¹⁵

“Barang siapa yang mengzalimi seseorang mu’ahid (seseorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesangguaannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Adapun hak-hak asasi manusia yang di lindungi oleh hukum Islam antara lain:

a. Hak hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam dianatara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah pembalasan bagi pembunuhan dan kejahatan lainnya diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Dalam QS Al-Israa’/17: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:


Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar,¹⁶

b. Hak Kebebasan Beragama

¹⁵T. Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Mnausia*, h.23.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 285.

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia (HAM), termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 256:


 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.¹⁷

c. Perlindungan kehormatan

Kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun, dan mereka terikat dengan untuk menjaga kehormatan orang lain. Negara Islam juga terikat harus melindungi kehormatan warga negara tanpa diskriminasi apapun.

d. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang.

e. Keamanan kemerdekaan pribadi

Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tidak ada seorangpun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan.

f. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 42.

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tidak kejahatan atau pelanggaran yang tidak diperbuatnya.

g. Hak untuk memprotes kezaliman (tirani)

Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah.

h. Kebebasan ekspresi

Islam juga menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.

i. Kebebasan hati nurani dan keyakinan

Agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia.

j. Hak keadilan hukum

Hak ini adalah suatu hak yang sangat penting dimana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap orang sebagai umat manusia.¹⁸

Dalam PBHI juga menjamin hak asasi manusia, dengan memberikan perlindungan hukum kepada fakir miskin sesuai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam yaitu berhak mendapat keadilan hukum. Terkait dengan perannya PBHI sendiri sebagai lembaga bantuan hukum yang bergelut dalam bidang hak asasi manusia telah mewujudkan hak-hak masyarakat kurang mampu yang meminta pendampingan hukum. Karena HAM merupakan misi utama para advokat

¹⁸Hasyim Aidid, *Studi Krisis Penegakan Hukum dan HAM Pada Komplik Sosial*, h. 66.

PBHI dan tidak menginginkan adanya diskriminasi Hak asasi manusia yang di langgar terkhusus hak asasi manusia terhadap masyarakat kurang mampu.

D. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Fakir Miskin

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh PBHI wilayah Sulawesi Selatan sudah disebut barang mutlak terbentur banyak kendala yang sering dihadapi.

Adapun yang menjadi kendala PBHI dalam memberikan bantuan hukum antara lain:

1. Tidak lengkapnya berkas perkara yang diajukan oleh pemohon kepada lembaga bantuan hukum seperti tidak memaparkan secara lengkap kronologis perkara ataupun kelengkapan berkas lainnya.
2. Pemahaman masyarakat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum seperti PBHI kurang dipahami oleh masyarakat sehingga respon dari masyarakat kurang terhadap bantuan hukum dan tahapan proses bantuan hukum, hal ini berpengaruh kepada keaktifan lembaga bantuan hukum yang dimana ingin membantu masyarakat namun pada realitanya masyarakat kurang memahami mengenai penyuluhan hukum.
3. Kendala berikutnya adalah terkait akses informasi yang tidak mudah yang kadang dipersulit untuk mendapatka informasi sehingga proses pemberian bantuan hukum tidak berjalan dengan maksimal.
4. Proposal pendanaan, terkhusus peran serta PBHI dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam menjalankan

aktivitasnya tidaklah mungkin terlepas dari yang namanya pendanaan dalam hal ini PBHI wilayah Sulawesi Selatan dalam hal pendanaan ditanggung oleh Negara yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain dari itu PBHI wilayah Sulawesi Selatan juga menjalin kerja sama dengan Panding (sponsor atau Simpatisan) untuk memperoleh anggaran operasional.¹⁹

Secara garis besar dana bantuan dari Negara adalah sebesar masing-masing 5 (lima) juta untuk kasus perdata maupun pidana yang penerimaannya diterima secara bertahap dan akan diterima total pada saat perkara tersebut sudah berada pada posisi berkekuatan hukum tetap (Inkra).

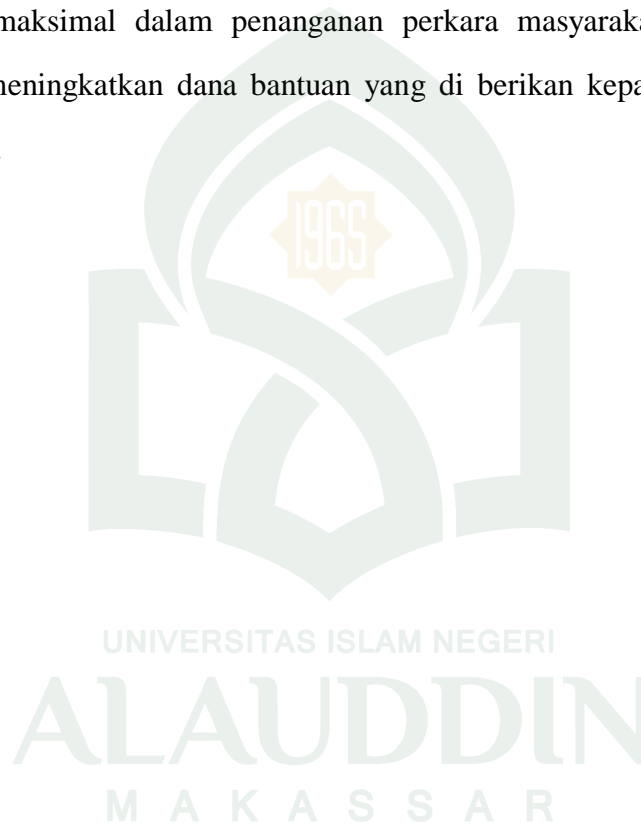
Untuk mengatasi kendala yang dialaminya, terkadang pihak PBHI harus turun tangan langsung dalam membantu menyiapkan dan melengkapi berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon, dan PBHI juga semakin sering mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dari PBHI itu sendiri serta kendala selanjutnya adalah masalah dana yang merupakan kendala besar dalam kinerja mereka, karena mereka tidak hanya menangani kasus di satu kota saja, tetapi sampai keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan. Jadi, karena hal ini maka tidak jarang para advokad PBHI harus mengeluarkan biaya pribadi selama perjalanan kerja kesana.

Ratih Putri selaku Bendahara di PBHI wilayah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa terkait kendala persoalan dana ini para Advokat PBHI merasa dana bantuan dari Negara untuk melakukan bantuan bagi masyarakat kurang mampu sangatlah

¹⁹Rachmad Sukarno, (29 tahun), Sekretaris PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 28 Januari 2017.

tidak memadai dikarenakan banyaknya hal-hal lain yang tidak terduga yang harus dikeluarkan dalam menangani perkara-perkara baik itu pidana maupun perdata.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa persoalan dana merupakan faktor utama yang menjadi kendala bagi PBHI dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yang berperkara. Oleh karena itu, untuk lebih maksimal dalam penanganan perkara masyarakat miskin Negara harusnya lebih meningkatkan dana bantuan yang di berikan kepada PBHI wilayah Sulawesi Selatan.



²⁰Ratih Putri K, SH, (32 tahun), Bendahara PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 30 Januari 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dan telah melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai lembaga bantuan hukum (LBH) seperti perannya sebagai *public service* (pelayanan publik), *social education*, *practical training*, nasehat hukum, bimbingan hukum, dan pemberi informasi hukum. Serta data yang penulis peroleh di lapangan sepanjang tahun 2016 hingga sekarang, PBHI wilayah Sulawesi Selatan sudah menerima berbagai jenis pengaduan kasus yang merupakan kasus *non profit* atau kasus yang ditangani secara gratis atau cuma-cuma dan lebih dominan ke kasus litigasi.
2. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam adalah HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia, dan beberapa hak asasi manusia yang dilindungi dalam hukum Islam. PBHI juga menjamin hak asasi manusia, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap fakir miskin sesuai hak-hak asasi manusia yang di lindungi oleh hukum Islam yaitu berhak mendapat keadilan hukum. Terkait dengan perannya PBHI sendiri sebagai lembaga bantuan hukum yang bergelut dalam bidang hak asasi manusia telah mewujudkan hak-hak masyarakat kurang mampu yang meminta pendampingan hukum.

3. Faktor yang menjadi kendala bagi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin adalah terdapat pada kelengkapan berkas yang diajukan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyuluhan hukum, akses informasi yang tidak mudah serta masalah dana yang kurang memadai.

B. Implikasi Penelitian

1. Agar hak konstitusional fakir miskin untuk mendapatkan bantuan hukum bisa terpenuhi secara maksimal maka sebaiknya tidak hanya menjamin hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum tetapi juga menjamin secara tegas akses untuk mereka memperoleh pembelaan advokat karena akses kepada advokat adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting.
2. Diharapkan bagi para peneliti hukum yang beragama Islam agar meneliti dengan seksama bahwa ada hak-hak asasi manusia yang telah dijamin dalam hukum Islam yang tentunya perlu dilindungi terkhusus terkait dengan hak memperoleh keadilan hukum.
3. Pemerintah di harapkan memberikan perhatiannya terkait kendala PBHI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum yaitu dengan mempermudah akses informasi, pengetahuan masyarakat mengenai penyuluhan hukum dan di harapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar dapat memberikan dana yang lebih maksimal lagi untuk menunjang proses penyelesaian perkara terhadap masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidid, Hasyim. *Studi Krisis Penegakan Hukum dan HAM Pada Komplik Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Cet. VII; Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT.Bumi Askara, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ar-Raafi, 2012.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hakim, M. Luqman. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamid, Hamrat. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Ibrani, Julius. *Bantuan Hukum Bukan Hak yang di Beri*. Jakarta Pusat: YLBHI, 2013.
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka setia, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cet.I; Bandung: Samil Qur'an, 2012.
- KUHP & KUHP*. Pustaka Mahardika, 2010.
- Kurnia, Titon Slamet. *Konstitusi HAM*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2012.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Maufur, Mustolah. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

- Moleon, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mus'udi, Masdar F. *Agama dan Hak Rakyat*. Jakarta: Guna Aksara, 1993.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Naning, Ramdlon. *Cita & Citta HAM di Indonesia*. Cet. I; Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983.
- Nasution, Harun & Bakhtiar Efendy. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Poernomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasehat Dan Bantuan Hukum Indonesia Latar Belakang Dan Sejarah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Sistem Pidana Anak 2012*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Siku, Abdul Salam. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Rabbani Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudjana, Eggi. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Sunggono, H. Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2009.
- T. Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 1999.
- Thaib, Dahlan & dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Winarta, Frans Hendra. *Advokat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (4 Maret 2017).
- Wikipedia, *Yayasan Bantuan Hukum Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia (4 Maret 2017).

Wawancara

Identitas informan

Nama : Abdul Aziz Saleh, SH

Umur : 36 tahun

Jabatan: Ketua PBHI

alamat : Makassar



u

Identitas Informan

Nama : Rahmad Sukarno, SH

Umur : 29 tahun

Jabatan: Sekertaris PBHI

Alamat: BTN CV. Dewi

Makassar



Wawancara

Identitas Informan

Nama : Adi Kusuma, SH., MH

Umur : 28 tahun

Jabatan: Devisi Advokasi dan
Bantua Hukum PBHI



Penyuluhan Hukum



Pendampingan Hukum



10/10 16 *ke kaji!*

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi
Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Di
Samata-Gowa

buat surat no 2
periksa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Sutra Santi
NIM : 10300113150
Semester/Klpk : VII/Hpk C
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ☒ Peran advokat sebagai penegak hukum dalam perkara pidana. */ judul sdh ada.*
- ☒ 2. Pemberian bantuan hukum oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan sebagai perwujudan Hak Konstitusional fakir miskin di Sulawesi Selatan. *perspektif Hukum Islam*
- ☒ 3. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana (Studi di Kabupaten Gowa) */ judul sdh ada.*

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

4 Oktober 2016

Mengetahui,

Pemohon

Penasehat Akademik

(Dra. Nila Sastrawati., M.Si)

(Sri Sutra Santi)

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2017

Judul Skripsi: Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah
Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin
Perspektif Hukum Islam

Gowa, 3 Januari 2017
Penyusun,



Sri Sutra Santi
Nim. 10300113150

Pembimbing I



Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi
Nip. 196312311995031006

Pembimbing II



Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
Nip. 197406272006042002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar




Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SRI SUTRA SANTI, NIM: 10300113150**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Peran Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan Dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam ”* Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

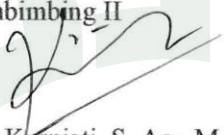
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I


Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi
Nip. 196312311995031006

Samata, 30 Mei 2017

Pembimbing II


Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
Nip. 197406272006042002

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SRI SUTRA SANTI, NIM: 10300113150**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam”* Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

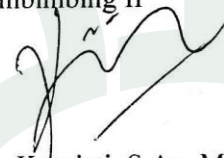
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 5 Juli 2017


Pembimbing I


Dr. M. Thanir Maloko, M. Hi
Nip. 196312311995310006


Pembimbing II


Dr. Kurniati, S.Ag., M. Hi
Nip. 19740627 200604 2 002

Penguji I


Dr. Fadli, S.H., M.H
NIP. 196610162014111001

Penguji II


Dr. Abd. Rahman, M.Pd
NIP. 197312312005011034



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 04 Tahun 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara : 1. Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi
2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Sri Sutra Santi
NIM : 10300113150
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Pemberian Bantuan Hukum Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam
 - b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 5 Desember 2016
Dekan,

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa.

Nomor : SI.1/PP.00.9/2017

Samata, 13 Januari 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2t, BKPMMD Prov. Sul-Sel.

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Sutra Santi
Nim : 10300113150
Fakultas/jurusan : Syariah Dan Hukum / HPK
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**PERAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA
(PBHI) WILAYAH SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi
2. Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan terkhusus pada wilayah Kota Makassar. terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata 13 Januari 2017

An Rektor,

Dekan Fakultas Syariah & Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus 1: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923
Kampus 2: Jl. H. M. Nasseih Limpo No. 36 Samata/Sunggurumanna - Gowa Telp. 841879 Fax 82214000*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 1006 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Sri Sutra Santi
N I M : 10300113150
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh ridwan, M.Ag
Penguji I : Dr. Fadli A. Natsif, M.H
Penguji II : Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 26 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 0 3 2 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 303/S.01P/P2T/01/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum
dan HAM Indonesia Wil. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/72/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SRI SUTRA SANTI**
Nomor Pokok : 10300113150
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULAWESI SELATAN DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Januari s/d 23 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Januari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 16-01-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov Sulsel@yahoo.com
Makassar 90222



Office :
Il. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16,
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90231
Cp : +62 811 4193 382
Email : Pbhisulsel@gmail.com – www.pbhi.or.id



All human are born free and rights. They are
endowed with reason and conscience and should
act towards one another in a spirit of
brotherhood
- article 1, universal declaration of human right

SURAT KETERANGAN

Nomor : 061/Int/PBHI-SS/II/2017

Yang bertandatangan di bawah ini,

ABDUL AZIZ SALEH, S.H. dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SRI SUTRA SANTI**
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Fakultas : Syariah dan Hukum
NIM : 10300113150

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul ***“Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin perspektif hukum islam.”*** Adapun penelitian tersebut dilakukan di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Februari 2017

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
(PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan
(Indonesian Legal Aid and Human Right Association Region South of Sulawesi)
Periode 2016 – 2018



PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
SULAWESI SELATAN

ABDUL AZIZ SALEH, S.H.
Ketua Badan Pengurus, -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sri Sutra Santi, lahir di Papanjaya tanggal 28 Juli 1994 dan merupakan anak tunggal dari pasangan Syamsuddin dengan Rosmini. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari Sekolah Dasar (SDN) Negeri 281 Sumalaya 2001-2007, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP NEGERI 2 BUKUMBA pada Tahun 2007-2010, kemudian melanjutkan pendidikan pada

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA NEGERI 5 BULUKUMBA pada Tahun 2010-2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR dengan mengambil konsentrasi Strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R